

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKOWISATA RIAM BAJANDIK DI DESA BARUKECAMATAN BATU BENAWA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

***Budi Satrya Tanjung¹, M. Nur Iman Ridwan²**

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin¹²
budisatrya56@gmail.com*

Abstract

This study aims to analyze community participation and inhibiting factors in the Development of the Riam Bajandik ecotourism site in Baru Village, Batu Benawa District, Hulu Sungai Tengah Regency. This research method uses a qualitative approach. This research is descriptive and tends to utilize analysis because it aims to discover, understand, explain, and obtain data and facts on the ground. The data collection techniques implemented in this study included observation, interviews, and documentation review. Data analysis was based on the theory of Miles, Huberman, and Saldana (2014), which analyzed data using three steps: data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The research findings indicate that community participation has several stages: initiation through pioneering efforts, development through development efforts, maturity through consolidation efforts, and rejuvenation through revitalization efforts. There are inhibiting factors in the development of the Riam Bajandik Ecotourism, including a limited budget to accelerate the growth and development of the tourist attraction, as well as minimal human resources who lack the skills to exploit business opportunities that can be sold to visitors and thus improve the community's economy. It is hoped that there will be governance that must also receive attention from the government, and the regional government needs to create a Draft Regional Regulation that regulates the terms and conditions for ecotourism development in rural areas.

Keywords: *Community Participation, Ecotourism Development, Riam Bajandik*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dan faktor-faktor penghambat dalam pembangunan ekowisata Riam Bajandik di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh data dan fakta lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini dengan observasi atau pengamatan, wawancara dan kajian dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan cara berdasarkan teori Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang menganalisis data menggunakan tiga langkah: *data condensation* (kondensasi data), *data display* (menyajikan data), dan *conclusion drawing and verification* (menarik simpulan atau verifikasi). Hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki beberapa tahapan yaitu: partisipasi dalam inisiasi dengan upaya perintisan, partisipasi dalam berkembang dengan upaya pembangunan, partisipasi dalam matang dengan upaya pematapan, partisipasi dalam peremajaan dengan upaya revitalisasi. Ada terdapat faktor-faktor penghambat dalam pembangunan Ekowisata Riam Bajandik yaitu minimnya anggaran dana untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan tempat wisata, selain itu juga sangat minimnya Sumber Daya Manusia yang kurang terampil dalam memanfaatkan peluang usaha yang dapat dijual ke pengunjung sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Harapannya perlu adanya tatakelola yang juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, dan Pemerintah daerah perlu membuat Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur syarat dan ketentuan pembangunan ekowisata dikawasan pedesaan.

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Pembangunan ekowisata, Riam Bajandik

PENDAHULUAN

Negara berkembang yang akan menuju sistem demokrasi akan membangun masyarakat demokratis dan memiliki pemerintahan yang stabil. Sistem demokrasi merupakan kerangka dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Ini disebabkan karena demokrasi itu merupakan suatu sistem nilai dan sistem politik yang sudah teruji dan diakui sebagai realistik dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial. Sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berbasis sistem demokrasi dianggap yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk saat ini. Dimana inti dari sebuah demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, karena pemerintahan apapun bentuknya sudah dipastikan berasal dari rakyat.

Demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang sumbernya berasal dari hati nurani rakyat dengan keinginan untuk mencapai suatu kedilan dan kesejahteraan. Maka dari itu pemerintahan yang demokratis merupakan pilihan terbaik. Konsekuensi dari pemerintahan yang demokratis yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus melibatkan partisipasi dari rakyat. Partisipasi merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan yang didalamnya ada partisipasi masyarakat. Sehingga dapat dikatakan partisipasi dalam suatu kebijakan publik selalu berkaitan dengan masyarakat sebagai objek yang dituju dari suatu kebijakan, kebijakan itu merupakan kerangka dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Perwujudan kepentingan masyarakat ini merupakan cerminan dari penghargaan terhadap hak asasi manusia dari setiap individu masyarakat sebagai subjek Pembangunan.

Partisipasi merupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai *stakeholders*, terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di tempat mereka masing-masing. Masyarakat juga turut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumber daya dan penggunaannya (Tikson, 2001). Partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata sangat berperan penting karena pertama partisipasi masyarakat adalah suatu alat guna memperoleh atau mendapatkan informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat, tanpa adanya masyarakat program pembangunan dan juga proyek-proyek tidak akan berhasil. Alasan kedua yaitu bahwa rakyat akan lebih percaya terhadap program pembangunan jika mereka merasa

dilibatkan dalam proses perencanaan dan persiapannya karena mereka juga akan tahu asal dari proyek tersebut dan juga akan mempunyai rasa memiliki kepada pekerjaan tersebut. Alasan ketiga yang akan mendorong adanya partisipasi yang bersifat umum di banyak daerah yaitu karena timbul pemikiran bahwa merupakan sebuah demokrasi bila kelompok masyarakat juga dilibatkan untuk pembangunan atau kemajuan masyarakat mereka sendiri.

Pariwisata pada masa kini merupakan sebuah kebutuhan mutlak bagi manusia, baik yang sedang melakukan perjalanan wisata ataupun juga masyarakat daerah sekitar tujuan wisata. Wisatawan perlu dipuaskan kemauannya, sementara itu juga warga disekitar lokasi pariwisata yang berharap akan mendapatkan dampak positif yaitu berupa peningkatan pendapatan ekonomi. Fenomena ini juga harus menjadi perhatian oleh para penyampai kebijakan karena sebagaimana yang telah diamanatkan bahwa pembangunan atau kemajuan kepariwisataan daerah diarahkan menjadi sektor unggulan dan andalan secara meluas dan akan dimaksudkan sebagai pemasukan daerah terbesar yang juga akan meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan memberdayakan perekonomian masyarakat, serta kesempatan berusaha masyarakat sekitar (Gelgel, 2006).

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan bentuk ekowisata yang dikembangkan, dioperasikan, dikelola serta memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat lokal (Mohd Noh et al., 2020). Keterlibatan masyarakat sekitar dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, misalkan adanya musyawarah dengan masyarakat lokal serta memastikan masyarakat lokal terlibat dalam pengelolaan ekowisata baik sebagian atau seluruhnya (Kiss, 2004). Ekowisata berbasis masyarakat merupakan salah satu pariwisata berbasis masyarakat yang banyak digunakan sebagai media untuk konservasi lingkungan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Ekowisata bergantung pada atraksi yang menarik yang disediakan oleh alam. Ekowisata berbasis masyarakat menghasilkan pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk konservasi serta sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat sekitar sekaligus mengalihkan perilaku masyarakat yang dahulunya mencari pendapatan dari mengeksploitasi alam beralih menjadi memelihara alam sebagai sumber pendapatan (Kiss, 2004).

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan destinasi pariwisata berkelanjutan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengatur tentang kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa secara garis besar terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu destinasi wisata agar dapat dikategorikan sebagai destinasi wisata berkelanjutan, yaitu:

- a. Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan;
- b. Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal;
- c. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung;
- d. Pelestarian lingkungan

Keempat kriteria tersebut sangat sejalan dengan model pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat, yang memiliki prinsip pemberdayaan masyarakat, menghargai budaya dan adat setempat serta menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah mulai mengembangkan Potensi wisata alam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melibatkan peran dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam penerapan Ekowisata berbasis masyarakat. Ekowisata berbasis masyarakat ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat yang dahulunya mengeksploitasi sumber daya sungai melalui cara-cara yang destruktif (misalnya dengan potas, setrum dan lain sebagainya), sekarang masyarakat justru menjaga ekosistem sungai yang merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial. Terjadi transformasi ekonomi di masyarakat, yang dahulunya hanya menggantungkan ekonomi mereka dari menangkap ikan menjadi berkembang ikut terlibat pada industri pariwisata dalam bentuk membuka homestay, membuka warung makan, jasa foto-foto dan sebagainya).

Perhatian dari pemerintah terhadap sektor pariwisata telah diwujudkan dari berbagai kebijakan pemerintah daerah, seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada tahun 2021-2026, yang salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini juga menjadi program prioritas yaitu program

peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Berkaitan dengan hal tersebut saat ini perencanaan pembangunan pariwisata harusnya mendapat dukungan langsung dari masyarakat dimana sangat penting keterlibatan dari masyarakat dalam mewujudkan pembangunan ekowisata yang ada di Kabupaten ini. Partisipasi masyarakat didalam pembangunan dimaksudkan sebagai penyelenggaraan konsistensi pembangunan yang akan diarahkan pada sebuah keberhasilan program yang sudah ditetapkan termasuk didalamnya kesungguhan agar mencapai tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan swasta.

Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu sungai Tengah bertransformasi menjadi desa ekowisata yang saat ini dikelola oleh pemerintah desa dan memiliki keterlibatan masyarakat, yang dikenal dengan nama Riam Bajandik. Konsep dari wisata ini adalah merupakan wisata alam yang berada di area pegunungan meratus. Tempat wisata ini memiliki banyak spot untuk berwisata sehingga pengunjung tertarik untuk mengunjungi tempat ini. Selain itu juga jarak tempuh dari pusat kota kabupaten tidak terlalu jauh. Tempat ini juga menyiapkan seperti persewaan gazebo, warung makan dan lainnya yang diperlukan pengunjung. Untuk masuk ke tempat wisata alam ini, pengunjung tidak perlu khawatir dengan biaya tiket yang mahal.

Tempat wisata ini awalnya pengelolaan dan pemanfaatan dikelola oleh sekelompok orang dari tahun 2019. Pada tahun 2021 terjadi banjir bandang dan desa Baru merupakan salahsatu desa yang sangat terdampak dari bencana tersebut. Pada saat itu tempat wisata Riam Bajandik hancur karena banyak asset-aset wisata yang hanyut dan rusak. Pemerintah Desa menawarkan untuk bekerjasama karena mengingat kepemilikan lahan yang menjadi tempat wisata tersebut merupakan aset desa. Tetapi dari pihak kelompok masyarakat sempat menolak dan merasa tidak terima apabila tempat wisata tersebut di ambil alih oleh Pemerintah Desa. Proses negosiasi dan segala bentuk sudah diusahakan oleh Pemerintah Desa hanya kelompok pengelola menawarkan jika desa bersedia membayar ganti rugi selama bangunan dan perlengkapan lainnya yang sudah dikeluarkan oleh kelompok. Pemerintah Desa menyetujui kesepakatan tersebut dan akhirnya dari tahun 2022 tempat wisata ini sudah menjadi tanggung

jawab desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) sebagai pengelolanya.

Upaya dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekowisata dengan mengajak kerjasama dengan pembentukan kelompok yang sadar wisata yang disebut juga POKDARWIS. Kelompok ini merupakan pelaku utama atau sebagai motivator dalam pembangunan ekowisata Riam Bajandik. Di Desa Baru memiliki 2 (dua) POKDARWIS yang masing-masing memiliki tanggungjawab terhadap ekowisata tersebut, yaitu POKDARWIS Riam Bajandik dan POKDARWIS Pulau Mas. Untuk POKDARWIS Riam Bajandik hanya bertanggungjawab terhadap ekowisata Riam Bajandik. Kerjasama antara POKDARWIS dan Bumdesa ini juga diharapkan dapat meningkatkan komunikasi antara *stakeholders* dan masyarakat dengan pihak yang terkait dalam mendorong tumbuhnya kemampuan masyarakat dan dapat apa saja yang selama ini menjadi hambatan dalam pelaksanaannya dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut dengan cara bersama sehingga ada atau tanpa bantuan fasilitas maka pemerintah dapat meningkatkan mutu keterlibatannya dalam pembangunan dan pengembangan ekowisata dengan melibatkan pihak terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta Forkopimcam dan Desa.

Sampai saat ini tempat wisata Riam Bajandik masih diminati oleh para wisatawan dan terus dikembangkan oleh pengelolanya. Dengan beralihnya pengelolaan tersebut maka kelompok pengelola terdahulu tidak ikut berperan serta dalam pengelolaan wisata saat ini. Kemungkinan kelompok pengelola tersebut merasa kalau mereka tidak berhak lagi untuk terlibat dalam pengelolaan wisata tersebut. Walaupun sebenarnya dari Bumdesa mengajak mereka untuk terus terlibat dan berpartisipasi dalam pengelolaan wisata ini. Pengunjung wisata Riam Bajandik kurang lebih 300 orang untuk hari biasa dan hanya sekedar weekend, jika libur hari besar jumlah pengunjung meningkat bahkan sampai 3000 orang. Dalam pengawasan dan keamanan di lingkungan wisata, Bumdesa memiliki unit usaha yang memang ditunjuk untuk bertugas di wisata tersebut.

Sannu Rahman (2021) menyatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata desa bentuk keterlibatannya dalam perencanaan dan pelaksanaan antara lain memberikan dukungan atau respon dan dalam bentuk sumbangan. Partisipasi masyarakat juga terlibat dalam pengembangan wisata seperti membantu dalam mengembangkan potensi unggulan misalnya pembuatan souvenir atau

cinderamata, serta makanan khas daerah. Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba dalam tata kelola Kawasan Wisata Alam Desa Kahayya diantaranya melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas, yaitu POKDARWIS, GENPI, POLTEKPAR, pendekatan untuk masyarakat pada ekonomi kreatif, dan membentuk RIPPPDA (Rencana Induk Perencanaan Pariwisata Daerah). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama penelitian kualitatif, serta sama-sama melibatkan organisasi yang ada di desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Ekowisata Riam Bajandik dan Faktor Penghambat dalam pembangunan Ekowisata Riam Bajandik di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Dimana menurut peneliti, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan dalam pembangunan ekowisata, hal ini dikarenakan dapat membantu membangun berbagai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam ekowisata yang ada di Kabupaten ini. Dalam partisipasi masyarakat adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan ekowisata yang ada di kabupaten ini maka akan cepat pula nantinya akan berkembang.

Idawati (2022), dalam penelitiannya menyatakan bahwa masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata, dikarenakan beberapa permasalahan, beranggapan pembangunan tanggung jawab pemerintah, tidak memiliki ketersediaan waktu, tidak adanya kemauan, solusi yang diberikan adalah dengan memberikan bimbingan, penanaman nilai kesadaran, perencanaan pembangunan, dan pentingnya pembangunan.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ilmiah maka metodologi yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, penelitian ini tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh data dan fakta lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena sesuai dengan visi pembangunan kepariwisataan kabupaten “Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai daerah tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mampu

mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat”.

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menentukan informan yang merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi penelitian dan merupakan obyek langsung.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Setempat
2. Perwakilan Kelompok Sadar Wisata Riam Bajandik
3. Tokoh Masyarakat
4. Wisatawan lokal

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini dengan observasi atau pengamatan, wawancara dan kajian dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan cara berdasarkan teori Miles, Huberman. dan Saldana (2014) yang menganalisis data menggunakan tiga langkah: *data condensation* (kondensasi data), *data display* (menyajikan data), dan *conclusion drawing and verification* (menarik simpulan atau verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekowisata Riam Bajandik adalah bentuk pariwisata yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan alam dan budaya sambil memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Prinsip dasar ekowisata ini mencakup penghargaan terhadap lingkungan, partisipasi masyarakat lokal, serta manajemen yang bertanggung jawab. Langkah pertama dalam membangun ekowisata adalah melakukan penilaian terhadap potensi lingkungan alam dan budaya di destinasi wisata. Ini melibatkan identifikasi sumber daya alam yang perlu dilindungi, warisan budaya yang perlu dilestarikan, serta potensi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan budaya.

Ekowisata Riam Bajandik dalam pembangunannya memiliki beberapa tahapan, yaitu :

Partisipasi dalam Inisiasi dengan Upaya Perintisan

Keterlibatan masyarakat lokal adalah kunci dalam pembangunan ekowisata. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya alam, dan

pengembangan produk pariwisata, kita dapat memastikan bahwa manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dan bahwa mereka memiliki kepentingan dalam melestarikan lingkungan dan budaya mereka. Dalam pembangunan ekowisata Riam Bajandik, melibatkan partisipasi dari masyarakat mulai dari perencanaan sampai kepada tahap pengambilan keputusan.

Gagasan atau ide terbangunnya ekowisata Riam Bajandik adalah berasal dari masyarakat. Pengelola Riam Bajandik pada tahun 2019 adalah masyarakat/warga desa Baru. Dalam pengelolaan warga tidak meminta tarif yang besar kepada pengunjung. Pengunjung hanya diminta membantu sumbangan sukarela jika ingin masuk menikmati tempat wisata ini. Semua perbaikan dan upah para penjaga tempat wisata pun didapat dari hasil sumbangan dari pengunjung.

“Pada tahun 2019 memang dikelola oleh masyarakat tetapi lahan tersebut adalah lahan milik desa. Setelah itu wilayah ini mengalami kerusakan yang disebabkan oleh bencana banjir bandang pada tahun 2021 sehingga semua bangunan yang ada di tempat wisata menjadi hancur dan pengelolanya tidak dapat memperbaiki tempat wisata tersebut (Pambakal Desa Baru, wawancara 20 Mei 2025)”.

Riam bajandik hanya menjual daya tarik air sungai tetapi banyak sekali disukai oleh pengunjung. Perlahan setelah mulai dikunjungi oleh warga yang ada diluar Desa baru, maka masyarakat sekitar mulai bergotong royong membeli perlengkapan lainnya untuk disewakan seperti payung besar lipat, meja dan kursi yang diletakkan di atas sungai sehingga pengunjung bisa menikmati aliran sungai tersebut.

Partisipasi dalam Berkembang dengan Upaya Pembangunan

Pemerintah desa berusaha melakukan negosiasi agar pengelola bisa bergabung dengan Bumdesa dan tetap bisa mengelola tempat wisata tersebut. Negosiasi tidak menemukan titik temu sehingga pengelola tetap ingin meminta ganti rugi sebanyak Rp. 50.000.000,-. Pemerintah desa menyetujui pembayaran dan mengalihkan pengelolaan wisata Riam Bajandik. Untuk saat ini pengelolaan ekowisata tersebut sudah diserahkan ke desa melalui BumDesa, tetapi untuk pembangunan dan pengembangan tempat tersebut

masih melibatkan masyarakat. Pengelolaan ini merupakan Kerjasama BumDesa dan Pokdarwis Riam Bajandik. Kegiatan musyawarah selalu melibatkan tokoh masyarakat dan masyarakat lainnya, walaupun tidak semua masyarakat terlibat.

Partisipasi masyarakat yang paling sederhana yaitu partisipasi yang diberikan oleh anggota Pokdarwis dan BumDesa yang diberi amanah untuk mengelola Ekowisata Riam Bajandik. Kedua kelompok tersebut masing-masing memiliki peran dalam pengelolaan. Keterlibatan pokdarwis lebih kepada teknis dilapangan dalam mengelola tempat wisata tersebut. Mereka memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam tempat wisata.

“Pokdarwis dibentuk sebagai wujud penggerak dalam upaya meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat sekitar tempat wisata. Kami juga terbentuk karena kepedulian kami sebagai tuan rumah yang baik untuk selalu menjaga kelestarian dan mengembangkan pariwisata yang ada disekitar agar memiliki nilai manfaat dan peluang usaha bagi masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Ketua Pokdarwis, wawancara 20 Mei 2025)”.

Partisipasi dalam Matang dengan Upaya Pemantapan

Pembangunan ekowisata di Riam Bajandik selanjutnya akan lebih di perluas lagi areal wilayah wisatanya. Pengelola sudah mulai merencanakan dengan salahsatu pemilik usaha yang ada disekitar untuk bekerjasama dalam pengelolaan lahan. Lahan tersebut akan dijadikan tempat parkir dan membangun rumah makan serta yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan para wisatawan. Kerjasama ini baru dalam tahap membuat kesepakatan dan nantinya akan dilanjutkan dengan membuat Mou dan menyepakati pembagian hasil dari pendapatan pengelolaan tersebut. Untuk saat ini pembangunan yang ada di wisata riam bajandik masih sangat jauh dari sempurna. Salah satu contoh adalah untuk tempat berganti pakaian para pengunjung hanya terbuat dari bangunan bambu yang disebut warga sebagai lanting, dikerjakan oleh para pengelola.

“Dalam waktu dekat wisata ini akan di kembangkan lagi wilayahnya karena akan ada Kerjasama dengan pengusaha wilayah

setempat yang akan meminjamkan lahannya untuk digunakan sebagai tempat parkir dan warung-warung makan (Pambakal Desa, wawancara 30 Mei 2025)”.

Partisipasi dalam Peremajaan dengan Upaya Revitalisasi

Salah satu kunci keberhasilan ekowisata adalah diversifikasi produk pariwisata. Selain menjaga keindahan alam dan budaya, destinasi ekowisata juga perlu menawarkan berbagai jenis aktivitas dan pengalaman wisata yang menarik bagi wisatawan. Dalam mendukung pembangunan ekowisata pendanaan pembangunan murni dari Anggaran Pemerintah Desa. Anggaran tersebut disalurkan melalui unit usaha yang ada di dalam BumDesa. Selain menambah pembuatan gazebo untuk disewakan kepada pengunjung, pengelola juga akan membuat tempat pusat oleh-oleh yang menjual produk olahan dan produk lokal. Untuk saat ini BumDesa desa Baru ini adalah BumDesa yang memiliki penghasilan terbesar dalam usahanya dalam menjalankan ekowisata ini. Semua penghasilan dari wisata Riam Bajandik seperti menjual tiket masuk, sewa gazebo dan sewa fasilitas umum menjadi pendapatan dari BumDesa. Warung makan yang berjualan disekitar tempat wisata juga diminta untuk berkontribusi membayar dengan nominal yang masih dalam bentuk wajar yaitu Rp. 10.000/minggu. Dari hasil kontribusi dari warung makan, dana yang terkumpul tidak masuk dalam pembukuan BumDesa tetapi dijadikan Kas untuk RT. Kebijakan ini diambil oleh Kepala Desa/Pambakal agar semua RT memiliki pemasukan yang nantinya dananya tersebut akan digunakan untuk membantu kegiatan yang ada di wilayah RT nya dan membantu keperluan warganya seperti memberi bantuan warga jika ada yang kesulitan dan mendapat musibah.

“Dalam pengelolaan wisata Riam Bajandik murni didanai oleh Pemerintah Desa melalui BumDesa untuk penyertaan modal awalnya 100 Juta (Pambakal Desa, wawancara 20 Mei 2025)”.

Faktor Penghambat

Keterbatasan Dana

Dalam pengelolaan ekowisata ketersediaan anggaran sangat penting, dimana dalam pengembangannya sangat memerlukan dana yang besar. Tempat wisata harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap sehingga dapat

menarik minat para pengunjung. Hasil pendapatan dari wisata Riam Bajandik masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah Desa Baru dan Sebagian juga berbagi hasil dengan BumDesa. BumDesa juga menyalurkan setiap tahun dana yang diberikan kepada masyarakat untuk dipergunakan membantu perekonomian masyarakat. Sehingga pendapatan yang mereka terima belum dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan tempat wisata yang lebih baik.

Harapan masyarakat pemerintah daerah dapat membantu dalam pengembangan wisata Riam Bajandik melalui Dinas terkait. Tetapi selama ini dinas terkait hanya memantau saja dan lebih mengutamakan kepada tempat wisata yang memang dikelola oleh pemerintah daerah. Wisata Riam Bajandik tidak setiap hari ramai dikunjungi oleh pengunjung karena hanya hari-hari tertentu saja terjadi ledakan pengunjung seperti libur hari-hari besar, libur tahunan, libur lebaran dan akhir pekan. Kadang pernah terjadi tidak ada pengunjung sama sekali yang datang, sehingga mempengaruhi pendapatan dan anggaran pembangunan menjadi terhambat. Dalam pembangunan dan pengembangannya wisata Riam Bajandik hanya berharap kepada retribusi yang diterima dari pengunjung. Berbeda dari tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, untuk pembangunan mengandalkan APBD.

Rendahnya Sumber Daya Manusia

Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam ilmu seni pariwisata dimana seharusnya ilmu tersebut sangat penting dalam mengangkat nilai-nilai budaya yang ada di Desa Baru. Selain menjadi tempat wisata, para pengunjung dapat mengetahui kearifan lokal yang ada di sekitar wilayah wisata. Faktor rendahnya SDM juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat membuat sesuatu yang dapat dijual berupa kerajinan dan oleh-oleh produk lokal untuk di tawarkan kepada pengunjung, sehingga mereka tidak akan mendapatkan penghasilan tambahan dari pengunjung.

Berdasarkan Hasil observasi dan wawancara dapat dilihat bahwa peluang usaha untuk mendapatkan tambahan penghasilan bagi masyarakat sangat banyak. Tetapi masyarakat hanya mengandalkan warung-warung makanan saja yang ada disekitar tempat wisata. Para

pengelola Riam Bajandik juga tidak mudah putus asa walaupun murni dikelola oleh masyarakat, mereka menjadikan ini sebagai tantangan dalam menghadapi mengembangkan wisata tersebut. Mereka juga melakukan promosi melalui media sosial, agar masyarakat dapat maju dan mandiri dalam mengembangkan wisata ini.

Perencanaan dilakukan secara bertahap dalam melaksanakan suatu program, minimnya anggaran salahsatu menjadi penyebab terhambatnya pembangunan wisata ini. Dalam pembangunan memerlukan waktu yang lama dari rencana yang ditargetkan. Selain minimnya dana, SDM juga salahsatu penghambat dalam pembangunan wisata. Selama ini sangat jarang sekali wisata yang mengangkat nilai-nilai tradisi budaya. Dipembanguna era milenial saat ini perlu didorong pembangunan dan pengembangan wisata mengarah ke destinasi alam dan pengembangan budaya daerah yang dapat menjadi daya tarik wisatawan dalam berwisata.

Pembekalan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat perlu dilakukan dalam cara pengembangan pariwisata sendiri. Banyak yang ditemukan saat ini pola pengembangan bersifat modern walaupun seperti di Riam Bajandik masih ada ditemukan seni yang menciptakan budaya lokal seperti membangun gazebo dan adanya loket masuk. Pengelolaan wisata Riam Bajandik sangat bagus berdasarkan hasil wawancara kepada pengunjung, walaupun wisata ini merupakan aliran sungai yang ada tumpukan batu-batu, tetapi pengunjung tidak khawatir akan kesulitan dalam menikmati wisata alam tersebut.

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan ekowisata Riam Bajandik

Partisipasi masyarakat terkait dalam pembangunan ekowisata Riam Bajandik dapat dilihat mengarah ke keterlibatan kurang aktif dalam peran serta pada perencanaan maupun pelaksanaan. Hasil wawancara dan observasi ada terdapat bentuk partisipasi masyarakat, sebagai berikut :

1. Partisipasi Pikiran atau Ide

Gagasan atau ide yang cemerlang dapat menunjang keberhasilan suatu rencana yang telah ditetapkan dan yang akan dilaksanakan dalam melakukan pembangunan ekowisata Riam Bajandik. Oleh karena itu, sumbangan pikiran berupa saran ataupun ide-ide sangat diharapkan

dapat membantu dalam upaya pencapaian dan perbaikan program-program pembangunan ekowisata yang akan dan telah dilakukan supaya mencapai hasil yang maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran atau ide adalah bentuk partisipasi disampaikan dalam musyawarah atau penyampaian program-program pembangunan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, partisipasi masyarakat desa Baru dalam bentuk pikiran dan ide masih sangat kurang, dimana masih ada masyarakat yang tidak ikut serta menyumbangkan pikiran dan ide yang cemerlang atau kreatif untuk keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun yang menjadi faktor penyebab masih kurangnya partisipasi masyarakat desa Baru dalam bentuk pikiran dan ide adalah tidak semua masyarakat memiliki keterlibatan langsung terhadap pembangunan ekowisata ini dan juga sangat minimnya pengetahuan masyarakat tentang mengeksplor ekowisata, sehingga kurang mampu dalam mencetuskan ide-ide atau pikiran yang kreatif guna mensukseskan program-program pembangunan ekowisata di desa Baru.

2. Partisipasi Tenaga

Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana dan lazim diberikan oleh anggota masyarakat dalam membantu mensukseskan pelaksanaan suatu pembangunan ekowisata adalah berupa tenaga atau dapat disebut dengan gotong royong. Gotong royong merupakan adalah pengerahan tenaga kerja tanpa bayaran untuk suatu proyek yang bermanfaat untuk umum atau yang berguna untuk pemerintah.

Dari uraian yang dipaparkan tersebut bahwa aktifitas gotongroyong selalu diiringi dengan pengerahan tenaga tanpa pamrih untuk kepentingan umum atau bersama. Pada saat merintis pembangunan ekowisata dalam setahun berjalan pengelola belum mendapat imbalan apapun, karena anggaran yang digunakan hanya untuk difokuskan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung wisata.

Masyarakat sangat antusias dalam mendorong pembangunan wisata tersebut karena jika dilihat dari sudut pandang ekonomi dengan adanya wisata maka akan banyak pengunjung yang datang dan dapat dijadikan penghasilan tambahan diluar pekerjaan masyarakat yang memang umumnya adalah bertani. Hal ini sejalan dengan penelitian Ricky Wirawan, 2015 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam dalam musrenbang kecamatan Dusun Selatan adalah hadir dan aktif. Dalam fenomena ini

terdapat sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kecamatan Dusun Selatan.

3. Partisipasi Harta atau Benda

Berdasarkan hasil wawancara partisipasi masyarakat dilihat dari bentuk partisipasi harta atau benda dalam mendukung pembangunan ekowisata Desa Baru tidak didapatkan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau benda ini tentunya akan sangat mendukung pelaksanaan program pembangunan ekowisata tersebut. Namun dalam kenyataannya anggaran untuk pembangunan fasilitas-fasilitas wisata hanya didapat dari penyertaan modal dan hasil pembelian tiket serta sewa gazebo yang didapat dari pengunjung. Maka dari itu pemerintah desa harus bijak dalam mempergunakan anggaran-anggaran bantuan dana pembangunan, dengan demikian pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar.

4. Partisipasi Keterampilan

Partisipasi keterampilan yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat dalam mendorong pembangunan ekowisata Riam Bajandik melalui keterampilan masyarakat dalam membentuk ragam atau macam-macam usaha. Ditempat wisata ini mereka menyediakan warung-warung masyarakat lokal yang menjual makanan dan minuman, ada juga yang menyewakan perlengkapan berenang untuk anak-anak, jasa foto, produk olahan hasil pertanian, dan lainnya. Berdasarkan hasil observasi dilapangan belum ada partisipasi tersebut ditemukan. Namun berdasarkan wawancara dengan ketua BumDesa kedepannya akan di lakukan pemberdayaan kepada pengelola unit usaha untuk dibekali keterampilan sehingga dapat menunjang pengembangan wisata dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

5. Partisipasi Sosial

Partisipasi ini adalah proses keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam suatu organisasi, dimana mereka melibatkan diri dengan beberapa individu dan melakukan kegiatan tersebut secara rutin. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat yang terlibat hanya yang ada dalam organisasi seperti BumDesa dan Pokdarwis, selain itu juga ada masyarakat yang memiliki usaha di sekitar tempat wisata. Bentuk partisipasi yang dapat dilihat adalah keterlibatan mereka ikut serta menjaga keamanan dan

kebersihan lingkungan baik di area tempat wisata dan sekitarnya.

Faktor-faktor Penghambat dalam pembangunan ekowisata Riam Bajandik Keterbatasan Dana

Faktor penghambat yang ditemukan pada penelitian pembangunan ekowisata Riam Bajandik hanya terdapat 2 (dua) faktor yaitu keterbatasan dana dan rendahnya sumber daya manusia. Untuk keterbatasan dana ada kesamaan dengan peneliti terdahulu Rahman Sannu (2021) dalam pengembangan wisata alam di Desa Kahayya masih minim dana, tetapi perbedaannya adalah untuk di Riam Bajandik dalam pembangunan sarana dan prasarana hanya menunggu Dana Desa atau anggaran Pemerintah Desa sedangkan pada penelitian terdahulu dalam pengembangan ada intervensi dari dana APBD I, APBD 2 dan Anggaran Pusat.

Dalam pengembangan atau pengelolaan ekowisata idealnya harus ada keterlibatan dari Pemerintah Daerah. Dengan belum optimalnya keterlibatan seperti Dinas Pariwisata, Dinas lingkungan Hidup dan Dinas lainnya maka dapat juga menjadi hambatan dalam pembangunan ekowisata Riam Bajandik.

Pemerintah Daerah pun belum ada mengeluarkan Peraturan Daerah yang bisa menjadi kekuatan hukum oleh pemerintah Daerah dalam menarik retribusi dari tempat wisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan kondisi saat ini ada beberapa kesenjangan yang ditemukan dalam pelaksanaan retribusi wisata. Salahsatu yang menjadi permasalahan adalah tidak terintegrasinya objek-objek wisata dengan pemerintah daerah. Sepertinya halnya yang ada di Riam Bajandik, usaha miik salahsatu pengusaha yang bukan penduduk asli desa Baru telah membangun rumah makan dan saat ini juga menambah usahanya dengan membangun penginapan tanpa izin dari pemerintah daerah dan belum ada kontribusinya sampai sekarang untuk kas daerah.

Retribusi ini sangat penting perannya dalam keberlanjutan pembangunan ekowisata. Dari hasil retribusi maka dapat dikumpulkan untuk dialokasikan membiayai pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Rendahnya Sumber Daya Manusia

Pengelolaan manajemen ekowisata Riam Bajandik masih lemah, hanya ada aturan penetapan Surat Keputusan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan hanya ada AD/ART tentang kepengurusan. Sehingga kekuatan aturan masih lemah, berbeda dengan penelitian terdahulu dalam kebijakan tatakelola pengembangan wisata dilakukan oleh Dinas terkait dan memiliki wewenang untuk mengintervensi organisasi yang terlibat dalam pengembangan wisata. Pelatihan manajemen tentang wisata yang di adakan oleh Dinas terkait juga hanya sebatas sosialisasi pengembangan desa wisata. Peran masyarakat dalam menjaga keberlangsungan ekowisata dengan adanya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan agar mencegah terjadinya banjir bandang seperti yang pernah terjadi pada tahun 2021. Bentuk kesadaran masyarakat yaitu dengan tidak lagi menebang pohon, membuang sampah rumah tangga kesungai dan sebagainya. Daerah aliran sungai sangat rawan akan longsor dan terjadinya pengikisan tanah.

Pembangunan ekowisata Riam Bajandik lingkup partisipasinya hanya di dalam desa. Padahal untuk diketahui di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih banyak potensi budaya dan kearifan lokal yang dapat menarik wisatawan, seperti yang ada di Kecamatan Haruyan yang terkenal dengan ragam aktivitas seni budaya dan di Kecamatan Batang alai Timur yang memiliki tarian adat. Dengan adanya Kerjasama antar desa dan kecamatan akan menjadi daya jual wisata yang lebih tinggi nilainya dari pada masing-masing desa atau kecamatan membuka wisata baru lainnya.

KESIMPULAN

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekowisata Riam Bajandik sangat baik dan memiliki peran yang penting. Walaupun sebelumnya wisata ini terbentuk oleh sekelompok masyarakat tetapi dengan di ambil alih oleh Pemerintah Desa maka pengelolaan lebih maju dan lebih berkembang. Walaupun keterlibatan masyarakat masih tetap ada dimana wisata tersebut dikelola oleh BumDesa yang didalamnya ada unit usaha pengelola, anggotanya berasal dari karang taruna dan bekerjasama dengan Pokdarwis. Dalam aspek manajemen didalam pengelolaan wisata Riam Bajandik sangat bagus. Meskipun kadang ada juga terdapat konflik internal, namun semua itu

dapat terselesaikan secara musyawarah. Keberadaan Riam Bajandik menjadi indikator keberhasilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik bagi masyarakat ataupun BumDesa. Selain itu juga Desa tersebut dapat berkembang dan selalu dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai pelosok daerah maupun luar negeri. Partisipasi masyarakat telah berhasil membangun solidaritas sosial dalam melaksanakan gotong royong dan berkontribusi terhadap pengembangan wisata ini.

2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pembangunan wisata ini seperti minimnya anggaran untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan tempat wisata sehingga para wisatawan semakin tertarik untuk berkunjung dan merasa nyaman dengan adanya fasilitas-fasilitas yang lengkap. Anggaran didapatkan hanya dari hasil retribusi, setoran parkir dan pengelola warung makan. Selain itu juga sangat minimnya Sumber Daya Manusia yang kurang terampil dalam memanfaatkan peluang usaha yang dapat dijual ke pengunjung sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan teori administrasi public, terutama dalam konteks partisipasi masyarakat dalam perannya bekerjasama dengan pemerintahan desa dalam pembangunan ekowisata Riam Bajandik.
2. Harapannya nantinya akan ada kolaborasi pengambilan kebijakan dari pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan dalam pembangunan Riam Bajandik.
3. Dalam manajemen administrasi harus tertib, seperti terdatanya jumlah pengunjung berdasarkan gender.
4. Perlu adanya tatakelola yang juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, seperti tertatanya antara pintu masuk dan pintu keluar dan adanya penetapan petugas pengelola secara khusus yang bertanggung jawab untuk keamanan di sekitar lokasi wisata.
5. Pemerintah daerah perlu membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang syarat dan ketentuan pembangunan ekowisata dikawasan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Ariyani, N., & Fauzi, A. (2023). Pathways toward the transformation of sustainable rural tourism management in Central Java, Indonesia. *Sustainability*.
- Bakari, I. H., Idi, A., & Ibrahim, Y. (2018). *Innovation determinants of financial inclusion in top ten African countries: a system GMM approach*.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The public administration dictionary*. ABC-Clio Santa Barbara, CA.
- Dewi, O. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Bahari Di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Makassar*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
- Gelgel, I. P. (2006). *Industri pariwisata Indonesia dalam globalisasi perdagangan jasa (GATS-WTO): implikasi hukum dan antisipasinya*. Refika Aditama.
- Gesso, C., Lodhi, R., & Cobanoglu, C. (2022). Local government's role in promoting city hospitality: A metaethnography with a public management perspective. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Griadhi, N. M. A. Y., & Utari, A. A. S. (2008). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Kertha Patrika*, 33(1).
- Idawati. (2022). Komunikasi Pembangunan Partisipasi Membangun Objek Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Medium Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta (ID): RI*.

- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. *Lembaran Negara RI Tahun, 4966*.
- Ishardino, W. S. (2011). Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. *Jurnal Kybernan* Vol. 2, No. 2. September 2011.
- Kulandima, R. U. L. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata (Tesis). Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Kusnadi, M., & Ibrahim, H. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Tersedia: Http://Www.Dpr.Go.Id.Html [5 Juni 2024]*.
- Matei, D., Chiriță, V., & Lupchian, M. (2021). Governance and tourism resilience during the COVID-19 crisis. *GeoJournal of Tourism and Geosites*.
- Miles, M. B., & Huberman A. M. (2014). Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong Lexy, J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murniati, (2008). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Maret Surakarta.
- Musaddad, A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar. Program Pasca Sarjana Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nurdiyanto, S. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Bleberan Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul*. Fakultas Dakhwa Dan Komunikasi Universitas Islam Negari Sunan Kaligaja Yogyakarta.
- Pitana, I. G. (2002). Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Bali dalam Pembangunan Pariwisata. Pada Seminar Nasional Pariwisata Bali the Last or the Lost Paradise. Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan. Denpasar: Universitas Udayana
- Pitana, I. G. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset.
- Purnamasari. (2008). *Studi partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pengembangan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. Program Pascasarjana Universitas Diponogoro, Semarang.
- Putri, A. P., & Abdillah, Y. (2019). Analisis perkembangan industri pariwisata dan perubahan nilai budaya pada kelurahan ubud kabupaten gianyar. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 68(1), 9–18.
- Rahim, E. (2013). Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal universitas negeri Gorontalo*
- Windasari, R. (2006). Identifikasi Potensi Lanskap Agrowisata Di Kawasan Pantai Bugel Kabupaten Kulon Progo (Skripsi). Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta
- Sannu, R. (2021). Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Desa Kahayya Kabupaten Bulukumba (Tesis). Program Pasca Sarjana Magister Manajemen. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Setyawan, I. W. E. (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Geopark Batur Di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli*. Jurusan Pendidikan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Genesha.
- Soehendy, J. (1990). *Partisipasi Masyarakat*, Jabar. Jetis

- Soekanto, S. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In Metode Penelitian Ilmiah.*
- Suwandi W. A. (2010). *Partisipasi Masyarakat Kelurahan Tosapan Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pango – Pango Di Kabupaten Tanah Toraja*. Program studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Syarifudin, K. (2004). *Pola Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Objek Wisata Pantai Tirta Samudra Jepara*. Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Dipenogoro
- Thresia, A. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Tikson, D. T. (2001). *Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Perkotaan. Modul Pelatihan Manajemen Perkotaan Kerjasama URDI, PPIS Sul-Sel Dan PPS UNHAS, Makassar.*
- Tjokroamidjojo, B. (2001). *Reformasi administrasi publik*. Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana.
- Utomo, S. D. (2003). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
- Wirawan, R. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.